

## ANALISA KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA DI PULAU SUMATERA

### ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT CONDITIONS IN SUMATRA ISLAND

Oleh:

Alit Rahayu<sup>1</sup>, Indri Arrafi Juliannisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati Nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Email penulis: [2010115027@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010115027@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Sejarah Artikel: Diterima April 2024, Disetujui Mei 2024, Dipublikasikan Juni 2024

#### ABSTRAK

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki kesenjangan pembangunan tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan pada beberapa kondisi pembangunan manusia di Pulau Sumatera. Pembangunan manusia dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang berkaitan dengan tujuan ke-3, 4, dan 8 *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki nilai pembangunan manusia yang optimal dan tidak optimal berdasarkan kondisi pendidikan melalui variabel dana BOS, kesehatan melalui variabel dana BOK, dan daya beli melalui variabel konsumsi per kapita. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berkelanjutan, yaitu *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) dengan menggunakan *software* Tosmana. Objek penelitian ini adalah 10 provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan wilayah-wilayah dengan pembangunan manusia yang optimal berdasarkan kombinasi kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya belinya, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, dan Jambi. Hubungan antara kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang didukung dengan program-program yang diterapkan pemerintah diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan manusia di tiap-tiap provinsi di Pulau Sumatera.

**Kata Kunci:** IPM, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kondisi daya beli

#### ABSTRACT

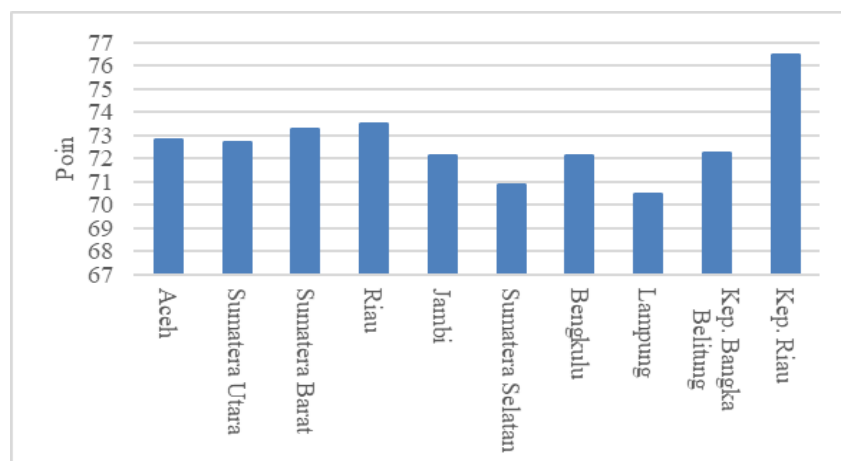
Sumatra Island is the third largest island in Indonesia with the highest development gap compared to other islands. It causes problems in several human development conditions in Sumatra Island. Human development can refer to three indicators: education, health, and purchasing power, which relate to goals 3, 4, and 8 of the Sustainable Development Goals (SDGs). The purpose of this study is to determine the regions with optimal and non-optimal human development values based on the condition of education through the BOS fund variable, health through the BOK fund variable, and purchasing power through the per capita consumption variable. This research uses a continuous analysis technique, the Qualitative Comparative Analysis (QCA), using Tosmana software. The object of this research is to ten provinces on Sumatra Island in 2022. The results show that the regions with optimal human development based on a combination of education, health, and purchasing power conditions are North Sumatra, Bengkulu, Riau Islands, Riau, and Jambi province. The relationship between the condition of education, health, and purchasing power supported by government programs is expected to have a positive impact on improving human development in each province on Sumatra Island.

**Keywords:** HDI, education condition, health condition, purchasing power condition

## PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur vital yang menjadi modal dalam menjalankan pembangunan. Peningkatan kualitas manusia diperlukan sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (BPS, 2021). Parameter yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berguna dalam meninjau kinerja pembangunan manusia antardaerah maupun negara (Kuncoro, 2006). Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dengan kondisi dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki kesenjangan pembangunan tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya karena cukup banyaknya daerah tertinggal dan pedalaman yang menyebabkan permasalahan pada pembangunan manusianya (Kemendesra, 2020).

Menurut teori *human capital* dari Romer (1990), manusia merupakan modal yang menjadi sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. Modal manusia memiliki peranan penting yang dapat ditinjau dari banyak sudut pandang, baik dalam pendidikan, pendapatan, kesehatan, maupun kebiasaan baik yang terus meningkat dalam menunjang produktivitasnya (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022). Pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi, tetapi juga dilihat dari kemampuan individu dalam mengakses sumber daya maupun memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Oleh karena itu, pembangunan manusia mencakup upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia melalui berbagai aspek (BPS, 2023b). Kondisi pembangunan manusia pada penelitian ini dijelaskan melalui kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli.



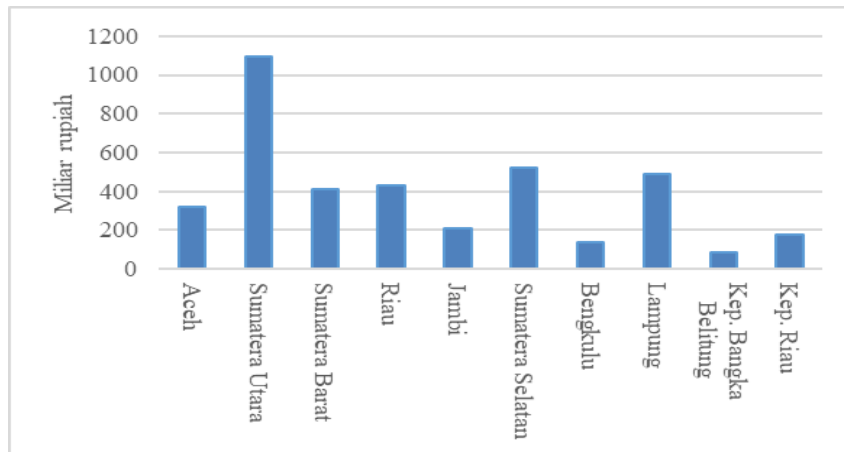
Grafik 1:  
Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Tahun 2022 (Poin)  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Provinsi dengan angka IPM tertinggi di Pulau Sumatera adalah Kepulauan Riau, yaitu sebesar 76,46. Capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan dari ketiga dimensi penyusun IPM. Dari sisi ekonominya, Kepulauan Riau unggul dalam sektor industri dan perdagangannya, contohnya di Kota Batam. Kondisi IPM selama 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan disparitas di kab./kota konsisten dalam menunjukkan perbaikan setiap tahunnya yang terlihat dari semakin rendahnya *gap* antara IPM yang terendah dan yang tertinggi (Pemprov Kepulauan Riau, 2022). Sementara itu, Lampung menjadi provinsi dengan angka IPM paling rendah yang dipengaruhi oleh belum

meratanya pembangunan di bidang perekonomian, pendidikan, dan Kesehatan (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022).

Pembangunan manusia dalam penelitian ini pertama dijelaskan oleh kondisi pendidikan yang dilihat dari segi pembiayaan yang menunjang keberhasilan SDGs, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah untuk menutupi biaya operasional non personalia yang dianggarkan sejak tahun 2005 guna mendukung program wajib belajar. Secara lebih lanjut, realisasi dana BOS hingga saat ini telah disalurkan ke berbagai jenjang,

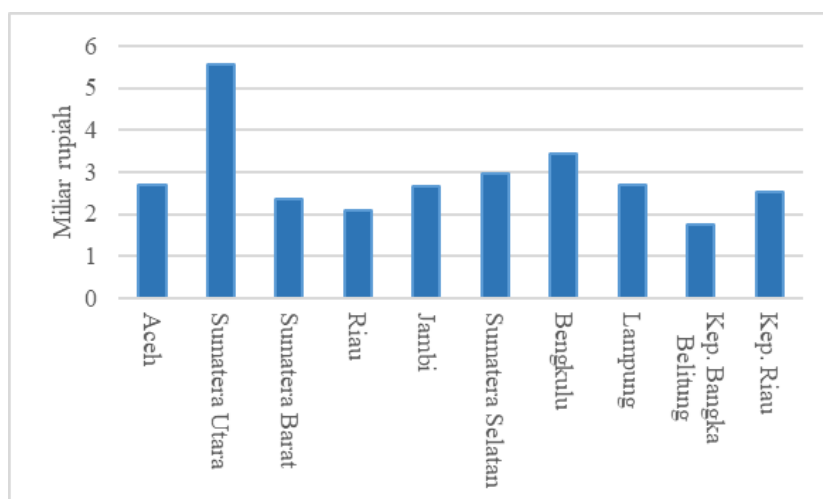
mulai dari SD, SMP, SMA, SLB, ataupun yang setara (Kemenkeu, 2022b).



Grafik 2:  
Realisasi Dana BOS 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022 (Miliar Rupiah)  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Realisasi dana BOS tertinggi dialokasikan oleh Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengatasi disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil yang masih sangat tinggi. Di samping itu, Bengkulu menjadi salah satu provinsi dengan alokasi dana BOS terendah dan menunjukkan permasalahan dari segi anggaran pendidikan yang rendah, pengelolaan dana BOS yang belum memadai, serta pengeluaran belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan (BPK RI, 2022b). Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan SDGs yang keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif.

Kondisi selanjutnya yang menjelaskan mengenai pembangunan manusia adalah kesehatan, yang dilihat dari segi pembiayaan berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana BOK adalah bantuan operasional yang membantu puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang preventif dan promotif sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Alokasi dana BOK juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan gizi anak, yaitu dalam mendukung percepatan penurunan stunting (Kemenkeu, 2021).

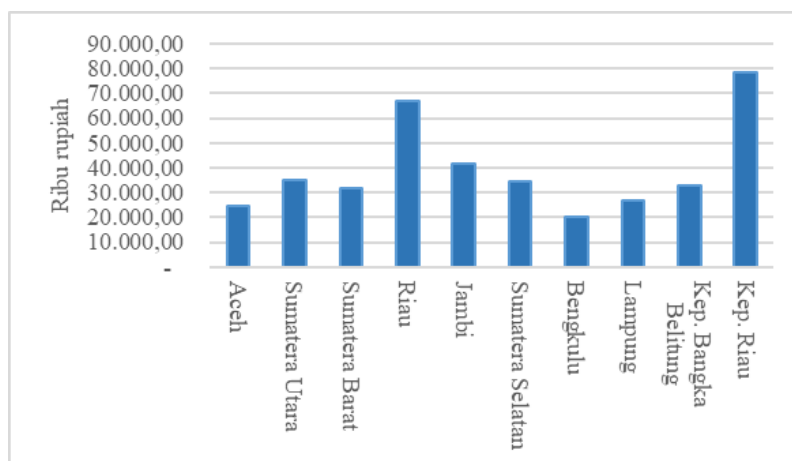


Grafik 3:  
Realisasi Dana BOK 10 Provinsi di  
Pulau Sumatera Tahun 2022 (Miliar Rupiah)  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan dana BOK tertinggi yang diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa permasalahan, seperti tenaga kesehatan yang masih terbatas, fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, capaian UHH yang rendah, maupun beberapa indikator SPM yang belum mencapai target (Dinkes Sumatera Utara, 2022). Di samping itu, Aceh menjadi provinsi dengan dana kesehatan yang besar karena ditopang dari dua sumber (dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus), tetapi kondisi kesehatan Aceh menunjukkan persoalan dari segi rendahnya

akses pelayanan dan fasilitas kesehatan, disparitas kondisi kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan, dan belum optimalnya ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan (Dinkes Aceh, 2022). Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan SDGs yang ketiga, yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Kondisi ketiga yang menjelaskan mengenai pembangunan manusia adalah daya beli yang dilihat dari angka konsumsi per kapita. Konsumsi menggambarkan standar hidup layak karena menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok.



Grafik 4:  
Konsumsi per Kapita 10 Provinsi di  
Pulau Sumatera (Ribu Rupiah)  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Provinsi dengan konsumsi per kapita tertinggi adalah Kepulauan Riau, sedangkan yang paling rendah adalah Bengkulu. Angka konsumsi yang tinggi seharusnya berdampak pada tingkat pembangunan manusia yang tinggi, tetapi hal ini tidak sejalan dengan kondisi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kedua provinsi dengan tingkat konsumsi yang tinggi ini justru termasuk provinsi-provinsi dengan capaian IPM paling rendah di Pulau Sumatera yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan yang tidak stabil dan cukup rendah (Nainggolan & Thereza, 2022). Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan SDGs yang kedelapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Pulau Sumatera bukan hanya menjadi penyebab dari rendahnya kualitas pembangunan

manusia, tetapi juga memberikan dampak pada tidak tercapainya tujuan dari SDGs. Penelitian dibuat dengan merujuk pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Bangun (2020) yang membuktikan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan yang dapat dilakukan melalui penambahan alokasi anggaran pada daerah dengan anggaran fiskal yang rendah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan. Putra (2022) menjelaskan bahwa alokasi dana BOS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah maupun penurunan jumlah buta huruf. Peningkatan kualitas pendidikan melalui dana BOS akan mempercepat proses pembangunan manusia. Menurut Maryozi et al. (2022), dana BOK diharapkan dapat menjadi modal pembiayaan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagai aspek penting dalam pembangunan kualitas SDM.

Penelitian dari Rahmawati & Bimanto (2021) dan Arum et al. (2023) membuktikan bahwa konsumsi per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Setiawan & Amar (2022) menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat menandakan semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam suatu perekonomian sehingga mengindikasikan terjadinya peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan teknik *Qualitative Comparative Analysis* (QCA), yaitu penelitian dari Wang (2019), Asha & Juliannisa (2023), dan Suprihartining et al. (2023) yang menganalisis wilayah-wilayah dengan klaster optimal dan tidak optimal dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, penelitian Askun & Erkoyuncu (2023) menjelaskan mengenai keberlanjutan pembangunan manusia menurut tata kelola dan kebijakan pemerintah dengan menggunakan teknik QCA. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 20 negara dengan kondisi yang optimal dan berkontribusi terhadap tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli sebagai input dari pembangunan manusia dan mengetahui pengelompokan wilayah yang optimal dan tidak optimal pada 10 provinsi di Pulau Sumatera.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2022 dengan sampel 10 provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2022. Penelitian ini mengamati kondisi pembangunan manusia yang dilihat berdasarkan kondisi pendidikan dari variabel dana BOS, kondisi kesehatan dari variabel dana BOK, dan kondisi daya beli dari variabel konsumsi per kapita dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berkelanjutan dengan metode *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) dan menggunakan Software Tosmana. QCA merupakan teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian mengenai fenomena sosial sebagai jalan tengah dari metode kuantitatif dan kualitatif. Metode QCA digunakan untuk melakukan perbandingan antarkasus dengan tujuan untuk melihat interaksi faktor-faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi *outcome* (Fauzi, 2019).

QCA memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode lain, yaitu pertama, memungkinkan dilakukannya perbandingan sistematis antarkebijakan antarnegara, wilayah, maupun sektor. Kedua, mampu melakukan analisis kombinasi yang kompleks antarfaktor yang berimbas pada *outcome* kebijakan. Ketiga, memiliki peran penting dalam evaluasi kebijakan melalui uji coba kombinasi kondisi yang menghasilkan *outcome* (Fauzi, 2019). Penelitian mengenai pembangunan manusia dengan metode QCA sampai saat ini masih jarang digunakan sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mencari referensi berdasarkan jurnal nasional. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penggunaan QCA, dimana pengolahan data QCA dengan menggunakan *software* Tosmana hanya dapat menginput data dengan maksimal lima variabel saja.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

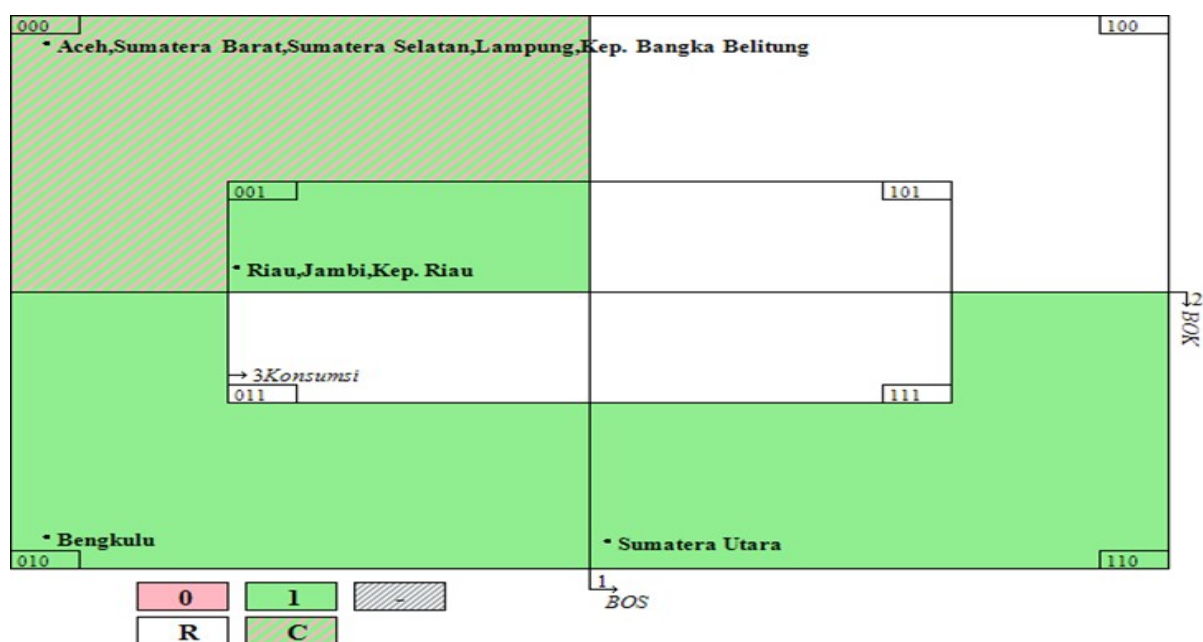
Kondisi pendidikan dan kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan pada suatu wilayah. Pada penelitian ini, kondisi pendidikan dan kesehatan dijelaskan dari sisi pembiayaan, yaitu melalui variabel dana BOS dan dana BOK. Dukungan pembiayaan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam mendukung peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai komponen dari dimensi pengetahuan dan umur panjang dan sehat yang membentuk IPM. Selanjutnya, kondisi daya beli dapat diartikan sebagai keadaan masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa yang diperlukan selama periode tertentu. Pada penelitian ini, kondisi daya beli dijelaskan melalui variabel konsumsi per kapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dukungan pembiayaan dari pemerintah dan tingkat konsumsi masyarakat yang sesuai menjadi faktor penting dalam mendanai berbagai kebutuhan masyarakat, baik pada fasilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan maupun pada pemenuhan kesejahteraan yang sesuai dengan standar hidup layak masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian dimensi-dimensi pembentuk IPM maupun pada tingkat IPM secara keseluruhan.

**Tabel 1:**  
**Truth Table Kondisi Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli**

Kabupaten/Kota	Dana BOS	Dana BOK	Konsumsi	IPM
Aceh (1), Sumatera Barat (1), Sumatera Selatan (0), Lampung (0), Kep. Bangka Belitung (1)	0	0	0	C
Riau, Jambi, Kep. Riau	0	0	1	1
Bengkulu	0	1	0	1
Sumatera Utara	1	1	0	1

Berdasarkan hasil *truth table*, terdapat 4 (empat) variasi klasifikasi antara IPM dengan kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. *Truth table* menunjukkan terdapat 3 (tiga) kondisi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya

beli yang kontradiksi, 1 (satu) kondisi yaitu daya beli yang mempengaruhi IPM, 1 (satu) kondisi yaitu kesehatan yang mempengaruhi IPM, dan terdapat 2 (dua) kondisi yaitu pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi IPM.



Gambar 5:  
 Diagram Venn Kondisi Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli  
 Sumber: Hasil Olah Data Software Tosmana, Data Diolah Tahun 2023

Gambar 5 menunjukkan visualisasi data untuk mengetahui dan menentukan optimal dan tidak optimalnya nilai dari setiap kondisi (faktor) terhadap IPM. Berdasarkan hasil penelitian, garis tengah vertikal menggambarkan dana BOS terbagi menjadi dua bagian, yaitu sisi kiri menunjukkan dana BOS dengan nilai “0” (tidak optimal), sedangkan sisi kanan menunjukkan dana BOS dengan nilai “1” (optimal). Garis tengah horizontal menggambarkan dana BOK yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sisi atas menunjukkan dana BOK dengan nilai “0” (tidak optimal), sedangkan sisi bawah menunjukkan dana BOK dengan nilai “1” (optimal). Kotak horizontal di tengah menggambarkan konsumsi,

yaitu area dalam kotak tengah horizontal menunjukkan konsumsi per kapita dengan nilai “1” (optimal), sedangkan area di luar kotak horizontal menunjukkan konsumsi per kapita dengan nilai “0” (tidak optimal).

Legenda di bawah diagram venn menunjukkan *outcome* (IPM), dimana nilai “0” (warna merah muda) berarti tidak terdapat *outcome* dan nilai “1” (warna hijau) berarti terdapat *outcome*. Simbol C (daerah diarsir) menunjukkan *outcome* yang kontradiktif, artinya IPM memiliki kondisi yang memungkinkan untuk dipengaruhi oleh kondisi pendidikan, kesehatan, dan konsumsi, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai. Simbol R

menunjukkan *outcome remainder*, artinya secara empiris kondisi pendidikan, kesehatan, dan konsumsi tidak mendorong pembangunan manusia, tetapi secara teori memungkinkan.

### Analisis Wilayah dengan Klaster Optimal

Klaster Sumatera Utara memiliki nilai IPM sebesar 72,71, termasuk angka IPM berkategori tinggi, dan menunjukkan *outcome* yang optimal (1). Sumatera Utara menempati peringkat ke-15 dari 34 provinsi, tetapi berdasarkan hasil analisis QCA menunjukkan kondisi yang paling banyak bernilai optimal (1), yaitu dari dana BOK dan dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis QCA dalam penelitian ini memiliki perbedaan pendekatan dari indikator yang digunakan oleh UNDP dalam mengukur pembangunan manusia.

Indikator dana BOS dan dana BOK merupakan parameter penting dalam menentukan kualitas pembangunan manusia meskipun tidak termasuk komponen dalam pengukuran IPM karena berperan penting dalam meningkatkan angka RLS, HLS, dan UHH sebagai komponen pendidikan dan kesehatan yang menyusun IPM. Menurut publikasi BPS, Sumatera Utara memiliki angka UHH sebesar 69,61 tahun, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 71,85 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Sumatera Utara belum berada pada kondisi yang baik. Dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara analisis QCA dengan pengukuran IPM, dimana hasil analisis QCA menunjukkan kondisi yang optimal, tetapi menurut pengukuran IPM menunjukkan hasil yang tidak optimal.

Kedua kondisi optimal di Sumatera Utara didukung oleh keberhasilan dari program pemerintah dalam mencapai target yang telah ditentukan, yaitu pada:

1. Alokasi dana BOK di Sumatera Utara merupakan yang terbanyak di Pulau Sumatera dan dimanfaatkan untuk mendukung program percepatan penurunan prevalensi *stunting*, melalui pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, suplemen tambah darah pada remaja, kapsul vitamin A pada ibu nifas dan anak, maupun imunisasi pada anak. Langkah-langkah ini diketahui efektif dalam menurunkan angka *stunting* menjadi 21,1% pada tahun 2022 yang telah lebih rendah dibandingkan capaian nasional (Pemprov Sumatera Utara, 2022).

2. Alokasi dana BOS di Sumatera Utara merupakan yang terbanyak di Pulau Sumatera yang digunakan untuk mendukung program pembenahan dunia pendidikan, yaitu untuk peningkatan ketersediaan dan gaji tenaga pengajar, maupun penyediaan fasilitas pendidikan dan media pembelajaran berbasis teknologi. Langkah-langkah ini berdampak positif terhadap capaian angka RLS dan HLS yang terus meningkat dan telah melampaui capaian nasional.

Klaster Bengkulu memiliki nilai IPM sebesar 72,16, termasuk angka IPM berkategori tinggi, dan menunjukkan *outcome* yang optimal (1). Bengkulu menempati peringkat ke-18 dari 34 provinsi, tetapi berdasarkan hasil analisis QCA klaster Bengkulu menunjukkan kondisi yang bernilai optimal (1), yaitu dari kondisi dana BOK. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis QCA dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari indikator yang digunakan oleh UNDP dalam mengukur pembangunan manusia. Menurut publikasi BPS, Bengkulu memiliki angka UHH sebesar 69,69 tahun, lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Bengkulu masih belum berada pada kondisi yang baik. Dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara analisis QCA dengan pengukuran IPM, dimana hasil analisis QCA menunjukkan kondisi yang optimal, tetapi menurut pengukuran IPM menunjukkan hasil yang tidak optimal.

Kondisi dana BOK yang optimal di Bengkulu didukung oleh keberhasilan dari program pemerintah dalam mencapai target yang telah ditentukan, yaitu alokasi dana BOK di Bengkulu merupakan yang terbesar kedua di Pulau Sumatera dan digunakan untuk membiayai program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana, berupa upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan memberikan pelayanan KB di seluruh fasilitas kesehatan. Selanjutnya, terdapat program percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan terhadap upaya pencegahan dan penanganan *stunting* (Wapres RI, 2023). Langkah-langkah ini diketahui efektif dalam menurunkan angka *stunting* menjadi 19,80% di tahun 2022 dan telah lebih rendah dibandingkan capaian nasional (Pemprov Bengkulu, 2023).

Klaster Kepulauan Riau memiliki nilai IPM sebesar 76,46, termasuk angka IPM

berkategori tinggi, dan menunjukkan *outcome* yang optimal (1). Hasil ini sejalan dengan posisi klaster Kepulauan Riau yang menempati peringkat ke-4 dari 34 provinsi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kondisi konsumsi yang optimal (1) dikarenakan keberhasilan dari program pemerintah dalam mencapai target yang ditentukan, yaitu pada indikator konsumsi per kapita yang tinggi sejalan dengan tingginya angka PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,09% *yoy*.

Terjaganya daya beli di Kepulauan Riau didukung oleh program penyaluran bantuan sosial berupa BLT subsidi BBM. Bantuan ini telah membantu 9.058 nelayan dan 27.578 masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar di DTKS tetapi belum pernah menerima bantuan sosial. Bantuan ini telah meringankan beban masyarakat dalam menjangkau kebutuhan rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan primer (BPK RI, 2022a). Selanjutnya, terdapat kegiatan pasar murah yang rutin diadakan di tiap kab./kota dengan menyediakan berbagai kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Kegiatan ini telah membantu masyarakat dan meningkatkan daya beli karena masyarakat dapat menghemat pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (Kemenkeu, 2022a).

Klaster Riau memiliki nilai IPM sebesar 73,52, termasuk angka IPM berkategori tinggi, dan menunjukkan *outcome* yang optimal (1). Hasil ini sejalan dengan posisi klaster Riau yang menempati peringkat ke-7 dari 34 provinsi. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kondisi konsumsi per kapita yang optimal (1) dikarenakan keberhasilan dari program pemerintah dalam mencapai target yang ditentukan, yaitu pada indikator konsumsi per kapita yang tinggi sejalan dengan tingginya angka PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,55% *yoy*.

Terjaganya daya beli di Riau didukung oleh adanya pasar murah di 12 kab./kota yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau karena adanya subsidi. Kegiatan ini diketahui telah membantu masyarakat karena dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat (Media Center Riau, 2022).

Klaster Jambi memiliki nilai IPM sebesar 72,14, termasuk angka IPM berkategori tinggi, dan menunjukkan *outcome* yang optimal (1). Jambi menempati peringkat ke-19 dari 34

provinsi, tetapi berdasarkan hasil analisis QCA klaster Jambi menunjukkan kondisi yang bernilai optimal (1) yang terlihat dari kondisi konsumsi per kapita. Analisis QCA dengan indikator konsumsi dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan indikator yang digunakan UNDP dalam mengukur pembangunan manusia, yaitu dengan menggunakan indikator konsumsi per kapita yang sejalan dengan pengukuran IPM dengan indikator pengeluaran per kapita.

Menurut publikasi BPS, Jambi memiliki pengeluaran per kapita sebesar 10.871 ribu rupiah, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 11.079 ribu rupiah yang menunjukkan bahwa kondisi daya beli di Jambi belum berada di kondisi yang baik yang disebabkan oleh pola pengeluaran masyarakat yang masih kurang terhadap pemenuhan kebutuhan di luar makanan (BPS, 2023a). Dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara analisis QCA dengan pengukuran IPM, dimana hasil analisis QCA menunjukkan kondisi yang optimal, tetapi menurut pengukuran IPM menunjukkan hasil yang tidak optimal.

Kondisi konsumsi per kapita yang optimal di Jambi sejalan dengan besarnya angka PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 5,13% *yoy*. Terjaganya daya beli di Jambi didukung oleh penerapan program-program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan BBM untuk 6.000 nelayan dan 5.000 penarik ojek, dan bantuan modal usaha bagi 793 pelaku UMKM. Program-program ini diketahui telah turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mengurangi kemiskinan, maupun menjaga daya beli karena menopang perbaikan konsumsi dan mendorong masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (BI, 2023).

### Analisis Wilayah dengan Klaster Kontradiktif

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli pada beberapa provinsi yang termasuk klaster kontradiktif (C), yaitu Klaster Sumatera Barat, Aceh, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung yang mempunyai nilai kontradiktif atau berada pada area C (arsiran). Posisi ini menunjukkan jika kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli pada klaster tersebut



sama-sama memiliki kondisi tidak optimal (0) yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada nilai *outcome* yang dihasilkan. Provinsi Sumatera Barat, Aceh, dan Kep. Bangka Belitung memiliki nilai *outcome* optimal (1), sedangkan Sumatera Selatan dan Lampung memiliki nilai *outcome* yang tidak optimal (0).

Klaster Sumatera Selatan memiliki *outcome* (0) yang disebabkan oleh hasil dari ketiga kondisi yang tidak optimal (0). Hasil tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan. Dari kondisi pendidikan, terdapat permasalahan dari kurangnya ketersediaan tenaga pengajar di tingkat SMA/K. Dari kondisi kesehatan, terdapat beberapa penyakit dengan jumlah kasus yang tinggi, yaitu ISPA dan hipertensi. Dari kondisi daya beli, tingkat konsumsi yang rendah sejalan dengan pengeluaran per kapita yang rendah dan pola pengeluaran masyarakat menunjukkan daya beli yang cukup rendah terhadap barang dan jasa di luar makanan (BPS, 2023c).

Klaster Lampung memiliki *outcome* (0) yang disebabkan oleh hasil dari ketiga kondisi yang tidak optimal (0). Hasil tersebut dipengaruhi oleh permasalahan dari kondisi pendidikan berupa ketersediaan guru yang masih kurang, kondisi kesehatan dari tingginya kasus *stunting* dengan total 23.550 anak dan kasus DBD sejumlah 3.484 kasus per Agustus 2022. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan yang kurang menghambat kualitas pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, bantuan anggaran pemerintah salah satunya melalui dana BOS dan dana BOK perlu ditingkatkan guna mengatasi permasalahan dan memperbaiki kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan (Lampost, 2023). Dari kondisi daya beli, tingkat konsumsi per kapita yang rendah sejalan dengan daya beli yang rendah terhadap barang dan jasa di luar makanan (BPS, 2023c).

Klaster Sumatera Barat, Aceh dan Kep. Bangka Belitung memiliki *outcome* (1), tetapi ketiga kondisi menunjukkan hasil yang tidak optimal (0). Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi di wilayah-wilayah ini sebenarnya memungkinkan untuk mendekati wilayah yang memiliki *outcome* yang optimal (berwarna hijau). Dari kelima klaster tersebut, hasil yang diperoleh yaitu kontradiktif, yang berarti pembangunan manusia hampir memungkinkan dipengaruhi oleh kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli, tetapi kenyataan yang diperoleh tidak mampu mendukung peningkatan

pembangunan manusia karena seluruh indikator bernilai rendah (0).

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli memiliki nilai optimal terhadap pembangunan manusia pada beberapa klaster, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, dan Jambi. Terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya nilai optimal pada kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli, yaitu:

1. Kondisi pendidikan didukung oleh program pembenahan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan guru dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Kondisi kesehatan didukung oleh program penurunan *stunting* dan pengendalian angka kelahiran melalui kegiatan imunisasi, pemberian suplemen tambah darah, dan penyuluhan *stunting*.
3. Kondisi daya beli didukung oleh program penyaluran bantuan sosial, modal UMKM, dan operasi pasar murah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang didukung oleh program-program pemerintah tersebut telah efektif dalam mendorong pembangunan manusia di Pulau Sumatera sehingga dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa. Kedepannya, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap target maupun kebijakan yang akan dicapai sehingga dapat terus mendorong pembangunan manusia yang berkualitas sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas yang mendukung pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, P. R., Fitri, Y., & Arum, P. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika*, 16(1), 424–433.
- Asha, N. A., & Juliannisa, I. A. (2023). Analysis of Socio-Economic Conditions in 34 Provinces Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 12(3), 297–307. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2563>

- Askun, V., & Erkoyuncu, M. (2023). Sustainability of Human Development Through Governance: A Qualitative Comparative Analysis of Countries. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(3), 1585–1608.
- Bangun, R. H. (2020). Peningkatan Kualitas Manusia dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi*, 17(2), 219–229.
- BI. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Jambi*.
- BPK RI. (2022a). *Pemprov Kepri Salurkan Bantuan BLT Subsidi BBM untuk 27.578 Masyarakat Terdaftar di DTKS*. kepri.bpk.go.id.
- BPK RI. (2022b). *WTP Kelima untuk Provinsi Bengkulu*. bengkulubpk.go.id.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*.
- BPS. (2023a). *Analisis Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Jambi 2022*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023b). *Indeks Pembangunan Manusia*. bps.go.id.
- BPS. (2023c). *Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi*.
- Dinkes Aceh. (2022). *Rencana Strategis SKPA*.
- Dinkes Sumatera Utara. (2022). *Rancangan Akhir P-Rensta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*.
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Berkelanjutan*. Gramedia.
- Kemendesa. (2020). *Daerah Tertinggal Menurut Perpres*. kemendesa.go.id.
- Kemenkeu. (2021). *Pemanfaatan DAK dan BOK untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting*.
- Kemenkeu. (2022a). *APBN Kita Regional Provinsi Kepulauan Riau Per 30 September 2022*. djpb.kemenkeu.go.id.
- Kemenkeu. (2022b). *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. djpb.kemenkeu.go.id.
- Lampost. (2023). *Kualitas Mutu Jadi Persoalan Pendidikan di Lampung*. m.lampost.co.
- Maryozi, Z., B. Isyandi, & Ando Fahda Aulia. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11.
- Media Center Riau. (2022). *Harga Terjangkau, Warga Bengkalis Ramaikan Operasi Pasar Murah Pemprov Riau*. mediacenter.riau.go.id.
- Nainggolan, F., & Thereza, B. S. M. (2022). Kesejahteraan Rumah Tangga Pertanian di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Analytical Research*, 1(1), 1–21.
- Pemprov Bengkulu. (2023). *Pemprov Bengkulu Sabet 3 Penghargaan BKKBN RI Sekaligus, Gubernur Rohidin: Berkat Kerja Bersama dan Sinergi Lintas Sektoral*. bengkuluprov.go.id.
- Pemprov Kepulauan Riau. (2022). *IPM Kepri 2022 Terus Meningkat, Gubernur Ansar Ingin Kepri Dapat Predikat "Sangat Tinggi"*. BPS.
- Pemprov Sumatera Utara. (2022). *Turunkan Angka Stunting, Pemprov Sumut Lakukan Dua Intervensi*. sumutprov.go.id.
- Putra, R. (2022). Evaluasi Keberhasilan Realisasi Dana Bos sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 115–131.
- Rahmawati, D., & Bimanto, H. (2021). Perbandingan Spatial Autoregressive Model dan Spatial Error Model dalam Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 5(1).
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1061.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), 71–102.
- Setiawan, D., & Amar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan, Tabungan Dan Konsumsi Tahun Sebelumnya Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 85–92.
- Suprihartining, E., Chalid Ahmad, A., Amin, C., & Abstrak, K. K. (2023). Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis: Studi Kasus Index Kebahagiaan di Indonesia Tahun 2021. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9, 111–116.
- Wang, M. (2019). On the Influencing Factors of the Equalization of Basic Public Services Based on the Empirical Study of Provincial Administrative Units in China in 2014.

*Proceedings of the 2nd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2019), 322, 604–607.*

Wapres RI. (2023). *Tinjau Penanganan Stunting di Bengkulu, Wapres Tekankan Pentingnya Pelibatan Pihak Swasta.* wapresri.go.id.

